

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, INVESTASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Eko Erifianto_1, Rino Radiansyah_2, Bayu Kusuma Putra_3, Gusti Ngurah Rai_4, Andi Dheayana Octavera_5.

Kanwil DJPb Sulteng_1, Kanwil DJPb Sulteng_2 Kanwil DJPb Sulteng_3, Kanwil DJPb Sulteng_4, Kanwil DJPb Sulteng_5.

Abstract

Central Sulawesi is one of the provinces in Indonesia with the highest investment and economic growth in Indonesia. However, can this high achievements have implications to reduce the poverty that is still high above the national average. This study aims to examine a significant effect of transfer spending to the regions and investment on increasing economic growth in the Central Sulawesi. also whether there is an influence between transfer spending and economic growth on the poverty rate in the Central Sulawesi.

The study used cross section and time series data methods from 13 regencies/cities in the Central Sulawesi region during 2014 to 2021. Based on the results of the analysis, found that transfer funds, DBH and DAU, had a positive effect on economic growth, while investment funds had no effect on regional economic growth. Furthermore, transfer funds, only DBH, have an effect on reducing poverty, while DAU, DAK, investment and GRDP still have no effect on reducing poverty in the Central Sulawesi.

Abstrak

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penerimaan investasi dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun tingginya capaian kedua hal tersebut apakah mampu berimplikasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi diatas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan belanja transfer ke daerah dan investasi yang masuk terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah sulteng. juga apakah terdapat pengaruh antara belanja transfer dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sulteng.

Peneitian menggunakan metode data cross section dan time series dari ke 13 kab/kota di wilayah Sulawesi tengah selama tahun 2014 sampai dengan 2021. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dana transfer yakni DBH dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana investasi belum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dana transfer yakni DBH berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan DAU, DAK, investasi dan PDRB masih belum memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di wilayah Sulawesi tengah. **Selain**

Keywords: Dana Transfer, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Kemiskinan

JEL Classification: C32, H61, H11

PENDAHULUAN

Tujuan bernegara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya ialah **"memajukan kesejahteraan umum"**. Tujuan tersebut yang menjadi dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Isu kesejahteraan tersebut kemudian menjadi fokus urusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Fokus tersebut kemudian ditetapkan dalam target-target pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kesejahteraan yang cukup menjadi perhatian ialah indikator kemiskinan yang dapat dilihat dari nilai persentase penduduk miskin. Perkembangan persentase kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami perbaikan kecuali pada periode awal pandemi di Maret 2020 hingga Periode September 2021, yang sedikit mengalami kenaikan. Namun angka kemiskinan tersebut kembali turun menjadi *single digit* ke angka 9,71% pada September 2021.

Berbeda dengan angka Nasional persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) justru selalu berada di angka *double digit* dan terakhir pada periode September 2021 Sulteng termasuk 10 besar Provinsi dengan angka persentase kemiskinan tertinggi.

Hal tersebut jauh berbeda dengan kondisi perekonomian yang ada di Sulteng, laju pertumbuhan ekonomi dalam indikator Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) tumbuh sangat baik, bahkan pada periode laporan terakhir PDRB Sulteng Tahun 2021 tertinggi ke-3 secara nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan kemiskinan. Karena dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka komponen-komponen yang menyebabkan kemiskinan seperti Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dapat ditekan, sehingga masyarakat terbebas dari garis kemiskinan (Fosu : 2010).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi di Sulteng juga terbilang sangat tinggi, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal investasi yang masuk ke sulteng khususnya investasi langsung luar negeri pada Tahun 2021 tercatat sebesar US\$2718,1 juta, atau tertinggi 3 secara nasional.

Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata (Sugiarto, Eddy C : 2019).

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan salah satu tujuan dari suatu pembangunan adalah berkurangnya tingkat kemiskinan, dimana hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son: 2003).

Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang diinginkan, mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang didukung dengan penganggaran yang akuntabel.

Pemerintah Pusat dalam mendukung dan memperkuat Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi mengerahkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Salah satu dari lima prioritas kebijakan TKDD Tahun 2022 adalah perbaikan kualitas belanja daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan antardaerah (Setkab.go.id).

Perdebatan mengenai peran TKDD dan Investasi terhadap percepatan pembangunan daerah khususnya pengurangan kemiskinan telah beberapa kali dilakukan dalam ranah ilmiah maupun studi empiris, dengan hasil atau kesimpulan yang beragam. Sebagian menunjukkan bahwa beberapa jenis TKDD berpengaruh positif terhadap perekonomian, dan membantu mengurangi kemiskinan, dan beberapa juga berkesimpulan bahwa TKDD memberikan efek negatif ataupun belum berperan maksimal sehingga justru menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk melihat apakah TKDD, dan Investasi yang masuk ke Sulteng dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Sulteng maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ini.

Berdasarkan pada esensi desentralisasi fiskal dari TKDD, manfaat adanya investasi, dan kontradiksi hasil penelitian terkait dengan pengaruh TKDD dan investasi terhadap perekonomian, dan terhadap kemiskinan di beberapa daerah

yang berbeda. Serta mempertimbangkan kondisi riil pelaksanaan TKDD di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Mengacu pada uraian yang telah disebutkan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1)Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021?;
- 2)Bagaimanakah pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021?;
- 3)Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021?;
- 4)Bagaimanakah pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021?;
- 5)Bagaimanakah pengaruh pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021; 2)Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021; 3)Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021; 4)Untuk mengetahui pengaruh DAU,

DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021; 5) Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2014-2021.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis pada penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, DAU berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, DAK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, DBH berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

TINJAUAN LITERATUR

Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Adapun secara spesifik dijelaskan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni keuangan daerah merupakan semua hak

dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban dengan ruang lingkup meliputi penerimaan daerah termasuk di dalamnya yaitu hak pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengeluaran daerah yang merupakan bentuk kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain, serta kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri maupun milik pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Kuswandi (2016) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan misalnya desentralisasi yang kemudian dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Desentralisasi merupakan bentuk contoh dari hubungan antara pemerintah pusat yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yaitu

menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus hak, kewenangan, dan kewajiban yang menjadi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan daerah terkhususnya untuk tinjauan kali ini pada pendapatan transfer yakni dana perimbangan yang kemudian dikelola dan dialokasikan untuk mendanai belanja daerah. Menurut Widjaja (2008:129), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran DBH dibagi menjadi 2 (dua) jenis komponen utama yaitu DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan

Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Serta DBH Sumber Daya Alam meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

DAU berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% dan 90% dari besaran DAU secara nasional. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah dan besaran gaji PNS Daerah dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel jumlah penduduk, luas wilayah meliputi luas darat dan luas wilayah perairan, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program,

kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (UU No.1/2022). DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas DAK Fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dan DAK Nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

Investasi

Investasi adalah bentuk dari penanaman modal untuk menghasilkan kekayaan, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap pengembalian (return) baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset riil (real assets) dan investasi pada aset finansial (financial assets). Investasi pada aset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, dan/atau mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham dan/atau obligasi (Abd.wefi, 2020). Menurut Sukirno (2004:435) pengertian investasi yaitu pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi juga dijelaskan dalam 2 (dua) teori yakni :Teori Neo Klasik, teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow, dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

Teori Harrod-Domar, teori ini mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, yaitu menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Di mana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2009).

Terdapat 2 (dua) jenis investasi yaitu berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis dan telah berlangsung lama baik pada tingkat regional maupun pada tingkat nasional. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah selalu berpengaruh erat pada tujuan mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mana di dalamnya termasuk pengentasan kemiskinan. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung, tingkat kemiskinan dapat ditekan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa problematika kemiskinan masih belum dapat terselesaikan secara keseluruhan.

Menurut Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012), kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena

multidimensional. Selain dari pengaruh dimensi perekonomian, kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi-dimensi lain seperti tingkat pendidikan yang selalu berikatan erat sebagai faktor dari kemiskinan yang mana diketahui pada saat ini tingkat pendidikan masih rendah untuk meningkatkan kualitas hidup lebih layak, selain itu tingkat kesehatan yang masih belum memadai untuk menambah angka harapan hidup, bertambahnya total penduduk yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi bertambah, dan total pengangguran yang semakin meningkat akibat dari berkurangnya lapangan kerja (Nurhidayah dan Hendikawati, 2018).

Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2016). Kemiskinan juga dapat dilihat dengan cara menggunakan perhitungan Head Count Index atau persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan yaitu dalam perhitungan indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan dan perhitungan indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk pengukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai

indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Keberadaan lingkaran setan kemiskinan berdasarkan teori nurkse (Kuncoro, 1997:107) memberikan dampak bersiklus atas kekurangan pada komponen-komponen pendorong perekonomian yaitu ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan SDM menyebabkan produktivitas rendah yang mana akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah. Pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Apabila pendapatan terus menurun, maka akan mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal yang mana kemudian akan berputar kembali pada ketidaksempurnaan.

Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau juga menjadi faktor kemiskinan yang mengakibatkan penduduk wilayah terpencil sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju dan akses untuk melakukan pengembangan taraf kehidupan juga terbatas (Suwandi, 2014:25). Kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah juga dapat menjadi faktor dari kemiskinan yang masih berlangsung. Hal ini dapat diketahui dengan pembangunan yang masih kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, masih banyak ketimpangan pembangunan di wilayah desa maupun kota, dan masih kurangnya perhatian pada produk UMKM pelaku usaha lokal.

Hubungan Dana Perimbangan dan Investasi dengan Kemiskinan

Hubungan Dana Perimbangan dengan Kemiskinan

Keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997).

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan lebih efisien dalam melakukan produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah daerah akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurut daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran

pembelanjaan sehingga lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimaksud adalah pengalokasian Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Rasu, dkk, 2019).

Selama periode desentralisasi fiskal, telah terjadi pertumbuhan ekonomi, perlambatan laju peningkatan jumlah penduduk miskin, peningkatan penduduk rawan pangan, penurunan ketahanan pangan dari sisi konsumsi, kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan daerah yang akan memengaruhi pengeluaran rutin dan pembangunan serta meningkatkan kinerja perekonomian dan menurunkan kemiskinan. Salah satu faktor penurunan Tingkat Kemiskinan di daerah adalah pengelolaan Dana Perimbangan terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen Dana Perimbangan menjadi anggaran yang sangat penting karena jumlahnya yang sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Apabila anggaran tersebut digunakan secara optimal, maka masalah kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (Anwar, dkk., 2016).

Secara rinci hubungan komponen dana perimbangan meliputi alokasi DAU yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan

digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan salah satunya menurunkan Tingkat Kemiskinan (Ismail dan Hakim, 2014). Dengan penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan sebagai bentuk perbaikan kualitas program bantuan masyarakat oleh pemerintah khususnya pada kabupaten/kota. Adapun untuk alokasi DAK, semakin tinggi penerimaan DAK, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan khusus yang juga menjadi target nasional (Basyir, dkk, 2015). DAK yang dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain. Apabila program-program khusus dari tahun ke tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan Tingkat Kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki kualitas hidup. Sementara itu, alokasi DBH dapat menambah jumlah anggaran yang digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan peningkatan program ekonomi di daerah.

Hubungan Investasi dengan Kemiskinan

Dalam penurunan tingkat kemiskinan diperlukan adanya peran investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya et al, 2012). Besarnya investasi yang masuk akan memberikan dorongan yang kuat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu,

Penurunan tingkat kemiskinan bisa dilihat melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada daerah tersebut. Peningkatan PDRB tergantung kepada realisasi investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja yang terserap. Tingginya investasi dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDRB pada wilayah tersebut, dengan meningkatnya PDRB maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Keberadaan investasi menjadi komponen penting dalam menyokong perkembangan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan investasi secara terus menerus akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas daerah. Investasi tentu membutuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang ditandai dengan kemudahan perizinan (izin investasi), serta kejelasan prosedur investasi yang semakin mudah dan efisien. Faktor-faktor ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, serta ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai diyakini merupakan faktor-faktor kunci pembentuk daya tarik atas investasi daerah.

Kebijakan investasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan optimalisasi investasi pada sektor unggulan maupun sektor potensial yang dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi berkembang dengan investasi. Daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan dan kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya dapat menaikkan investasi

(Omoniyi. B, dkk, 2011). Sulawesi Tengah memiliki beberapa sektor potensial yang belum dioptimalkan misalnya pariwisata, pertambangan, perikanan, dan perkebunan.

Selain itu, peluang investasi juga terdapat pada sektor infrastruktur yang memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur menimbulkan pertumbuhan dan perluasan pergerakan ekonomi melalui efek multiplier. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi yang mana pada akhirnya diharapkan dapat membantu dalam menekan peningkatan tingkat kemiskinan. Tinjauan literatur meletakkan landasan teoritis/analitis/logis bagi sebuah karya tulis/karya ilmiah bukan hanya membahas mengenai definisi.

1. Literatur yang digunakan harus sesuai dengan topik karya ilmiah/artikel yang ditulis.
2. Bagian ini memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian serta menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Pada bagian ini, kerangka teori (*theoretical framework*) dibangun berdasarkan telaah literatur ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu studi, termasuk pengembangan hipotesis dan model riset yang sifatnya berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan pokok/fokus permasalahan.
4. Teori yang dianalisis merupakan suatu kerangka yang sifatnya mendukung (*protagonistic*) atau yang bersifat menyangkal (*antagonistic*) terhadap dugaan

- (*hypothesis*) yang mungkin ada dalam cara berfikir peneliti.
5. Bagian ini juga dapat menguraikan hipotesis yang akan diuji.
 6. Penulis dapat memaparkan landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proposisi riset dan model penelitian
 7. Bagian ini juga memuat penelitian-penelitian terdahulu, *research gap* atau limitasinya, serta debat dan perkembangan konsep atau teori yang digunakan
 8. Usahakan menggunakan literatur yang dibahas serta menjadi referensi pada bagian ini adalah penelitian atau literatur yang dipublikasikan dalam waktu 10 tahun terakhir.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data realisasi TKDD kab/kota di Provinsi Sulteng 2014-2021 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Dataset DDAC 2022; Data investasi Kab/Kota di Provinsi Sulteng 2014-2021 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); data Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2010 kab/kota di Provinsi Sulteng 2014-2021 dan persentase kemiskinan kab/kota di Provinsi Sulteng 2014-2021 dari situs resmi Sulteng BPS;

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data panel (gabungan antara data *time-series* dan *cross section*). Data time series yang digunakan dimulai dari 2014 hingga 2021. Sedangkan data *cross section*-nya adalah 13 kabupaten/kota di Sulteng. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling yakni sampel diperoleh dengan berdasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria sampel tersebut adalah data kab/kota di Sulteng yang mempunyai data realisasi DAU, DAK,

DBH tahun 2014-2018; kab/kota yang memiliki pemasukan investasi tahun 2014-2021; PDRB kab/kota atas harga konstan tahun 2014-2021; dan Persentase Kemiskinan kab/kota pada tahun 2014-2021. Dalam penelitian ini Pemerintah Provinsi Sulteng dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak terdapat data investasi.

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin; 2) variabel independen dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, DBH, Investasi, dan PDRB yang diukur dengan logaritma dari nilai realisasinya.

Keseluruhan data ditransformasikan kedalam translog, guna menyederhanakan satuan dari setiap variabel. Bentuk translog tersebut juga menunjukkan elastisitas data setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan teknik regresi *ordinary least square* (OLS) untuk melihat pengaruh TKDD dan investasi terhadap PDRB, seerta pengaruh TKDD, Investasi, dan PDRB, terhadap kemiskinan.

Dengan demikian spesifikasi umum sistem persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Persamaan I

$$\text{LogPDRB}_{it} = C(1) + C(2) * \text{LogDAK} + C(3) * \text{LogDAU} + C(4) * \text{LogGDBH} + C(5) * \text{LogDANA_INVESTASI} + \varepsilon_1 (I)$$

Persamaan II

$$\text{LogKMS}_{it} = C(6) + C(7) * \text{LogDAK} + C(8) * \text{LogDAU} + C(9) * \text{LogGDBH} + C(10) * \text{LogDANA_INVESTASI} + C(10) * \text{LogPDRB} + \varepsilon_2 (II)$$

Analisis dilakukan dengan tahapan pemilihan model data panel melalui Uji

Chow, Uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, selanjutnya dari permodelan dilakukan Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi) untuk melihat normalitas data yang ada. Setelah lulus uji asumsi klasik dilakukan analisis regresi data panel, yang hasilnya kemudian dilakukan uji statistik untuk melihat signifikansinya. (

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan I

$$\text{LogPDRBit} = C(1) + C(2)*\text{LogDAK} + C(3)*\text{LogDAU} + C(4)*\text{LogGDBH} + C(5)*\text{LogDANA_INVESTASI} + \varepsilon_1 (I)$$

Persamaan II

$$\text{LogKMSit} = C(6) + C(7)*\text{LogDAK} + C(8)*\text{LogDAU} + C(9)*\text{LogGDBH} + C(10)*\text{LogDANA_INVESTASI} + C(10)*\text{LogPDRB} + \varepsilon_2 (II)$$

Pemilihan Model Data Panel

Berdasarkan hasil uji terhadap model (Uji Chow, Uji Hausman *cross section chi-square* memiliki nilai probabilitas <0,05. Penelitian model 1 lebih tepat menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dari analisis regresi data panel. *Fixed Effect Model* adalah model dimana variabel bebas dalam model diasumsikan bersifat fixed atau tetap. Artinya individu atau unit *cross section* masih memiliki hubungan antara variabel independennya.

Sedangkan untuk model 2 menggunakan metode *Random Effect Model* (REM), dimana variasi nilai arah dan arah hubungan antar subyek diasumsikan random. Hal ini berdasarkan Uji Hausman nilai *cross section chi-square* memiliki nilai probabilitas >0,05, dan uji Lagrange Multiplier nilai both <0,05.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji *Jarque-Bera*. Nilai probabilitas persamaan I dan II lebih kecil dari 0,05 sehingga model persamaan I dan II tidak terdistribusi secara normal. Akan tetapi, residual dalam model persamaan tersebut diasumsikan terdistribusi normal berdasarkan *Central Limit Theorema*, yaitu data diasumsikan terdistribusi normal jika ukuran sampel lebih dari 100 (104 sampel) (Gujarati: 2004).

Uji Multikolinieritas

Nilai correlation variabel independen <0,90 sehingga tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan, nilai probabilitas model persamaan I dan II lebih kecil dari 0,05, sehingga model persamaan I dan II terdapat masalah heteroskedastisitas. Dalam *evIEWS*, permasalahan heteroskedastisitas dapat diatasi menggunakan metode *Generalized Least Squared* dengan opsi *cross-section weights* karena lebih layak digunakan ketika jumlah *cross section* lebih besar dari jumlah periode waktu (EvIEWS, 2017).

Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi untuk persamaan I dan II probability *Chi-square* <0,05 sehingga terjadi masalah autokorelasi. Permasalahan autokorelasi dapat diatasi menggunakan *robust variance matrix* melalui opsi *white periode* pada menu *coef covariance method* (EvIEWS, 2017).

Hasil uji statistik

Persamaan I

$$\begin{aligned} \text{LogPDRBit} &= -14.5004706902 - 0.0384436149634* \\ \text{LogDAK} &+ 0.635149518978*\text{LogDAU} + 0.290748180525* \\ \text{LogDBH} &- 0.0039888288154*\text{LOGDANA_INVESTASI} + \varepsilon_1 \end{aligned}$$

Nilai adjusted R² model persamaan I sebesar 0,947664, artinya variabel DAU, DAK, DBH, dan dana investasi dapat menjelaskan PDRB sebesar 94,76%. Selisihnya sebesar 5,24% dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan I. Hasil uji F model persamaan I menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Hal ini diinterpretasikan bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan dana investasi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap PDRB. Berdasarkan nilai probabilitas dan uji t, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan DAK dan Dana Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan probabilitas t-statistik <0,05;

Persamaan II

$\text{LogKMSit} = 2.89332542018 - 0.0499012408944 * \text{LogPDRB} + 0.0167361558587 * \text{LogDAK} + 0.0596341890579 * \text{LogDAU} - 0.0761143078078 * \text{LogDBH} - 0.000293913659484 * \text{LogDANA_INVESTASI} + \varepsilon_2 \text{ (II)}$

Nilai adjusted R² model persamaan II sebesar 0,390127, artinya variabel DAU, DAK, DBH, dana investasi, dan PDRB dapat menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 39,1%. Selisihnya sebesar 60,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan II. Hasil uji F model persamaan II menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Hal ini diinterpretasikan bahwa DAK, DBH, dana investasi, dan PDRB berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kemiskinan. Berdasarkan nilai probabilitas dan uji t, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan DAU, DAK, Dana Investasi, dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dengan probabilitas t-statistik <0,05.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis, DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien DAU sebesar 0,64, artinya setiap kenaikan DAU satu persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB sebesar 0,64 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori federalisme fiskal, teori Keynes. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gunantara dan Dwirandra (2014), dan Jolianis (2016). DAU berpengaruh positif signifikan karena perhitungan besaran DAU setiap kabupaten/kota mempertimbangkan banyak aspek sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya serta DAU yang bersifat block grant dengan jumlah alokasi yang cukup besar membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dalam mengalokasikan belanja yang bersumber dari DAU. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja untuk meningkatkan layanan penduduk sehingga tercipta kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan output barang dan jasa yang diproduksi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. DAU digunakan untuk mendanai bantuan modal usaha bagi industri kecil dan menengah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan bantuan peralatan. Bentuk bantuan berupa pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan keterampilan penduduk sehingga produktivitas penduduk dapat meningkat dan output barang dan jasa yang diproduksi semakin banyak. Bantuan peralatan dapat memperlancar proses produksi yang akan berdampak terhadap

kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis, DBH berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien DBH sebesar 0,29, artinya setiap kenaikan DBH satu persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB sebesar 0,29 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul Widyasari (2013).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfa Eliza et.al (2014).

DAK yang sejatinya dialokasikan pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai dengan prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Namun berdasarkan uji statistik menunjukan bahwa DAK masih belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selama ini DAK yang disalurkan lebih banyak digunakan untuk program-program peningkatan pelayanan publik yang sifatnya non fisik dan bukan ke belanja fisik yang dapat meningkatkan belanja modal yang dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dll.

Pengaruh Dana Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis, Investasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Gusti Ayu, et. Al (2017), Junaidi E (2013).

Besarnya investasi yang masuk di Sulteng lebih banyak ditunjang dari investasi penanaman modal asing (PMA). Selama 8 tahun ke belakang, proporsi PMA sebesar lebih dari Rp100 triliun atau lebih dari 96% dari total investasi yang masuk ke Sulteng. Namun berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulteng selama 8 tahun kebelakang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan besarnya investasi yang masuk masih belum mampu menyerap tenaga kerja lokal. Mengingat kualifikasi kerja perusahaan yang ada di Sulteng belum mampu dipenuhi melalui besaran tenaga kerja yang ada. Dimana hal ini mengakibatkan tenaga kerja yang masuk atau bekerja di perusahaan tersebut berasal dari luar daerah.

Selama ini penyokong PDRB terbesar berasal dari 4 Kabupaten yang memiliki nominal PDRB diatas Rp10 triliun. Adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi mengakibatkan kurang meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulteng.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian hipotesis, DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini disebabkan akibat kedua dana tersebut tidak digunakan untuk belanja produktif seperti pembentukan belanja modal dan pembangunan sarana dan prasaran publik. Belanja modal pada APBD Sulteng yang berasal dari dana transfer secara rata-rata sangat minim yakni hanya berkisar di bawah 25%. Transfer DAU digunakan untuk pembayaran

belanja operasional dan pembayaran gaji pegawai.

Sedangkan DAK kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian hipotesis, DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel kemiskinan. Nilai koefisien DBH sebesar -0,076, artinya setiap kenaikan DBH satu persen akan menurunkan kemiskinan yang diprosikan persentase penduduk miskin sebesar 0,076 persen. Penerimaan Dana Bagi Hasil selama 8 tahun terakhir tidak lebih dari 8% dari total keseluruhan dana transfer yang masuk ke wilayah Sulteng. DBH dan dana transfer lainnya menjadi pendapatan daerah melalui pendapatan transfer yang masuk ke APBD pemerintah daerah, yang mana nantinya penggunaan dana tersebut secara bersama-sama digunakan untuk belanja pmda yang salah satunya digunakan untuk kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing. Tingkat kemiskinan di Sulteng terbilang masih cukup tinggi yang nilainya selalu berada di atas angka nasional, dan rata-rata setahun hanya mampu turun sekitar 0,08 poin.

Hanya terdapat 2 kab/kota yang angka persentase kemiskinannya dibawah dua digit, yakni Kab. Banggai dan Kota Palu. Kab. Banggai sebagai penerima DBH tertinggi selama 8 tahun kebelakang mampu menurunkan rata-rata tingkat kemiskinan per tahun sebesar 0,2 persen point, angka ini merupakan penurunan

persentase kemiskinan tertinggi di wilayah Sulteng.

Hal ini mengindikasikan pemanfaatan dana transfer yang salah satunya DBH untuk program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian hipotesis, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tingginya ketimpangan pendapatan yang berasal dari ketimpangan potensi ekonomis wilayah sehingga menyebabkan belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah. Sehingga angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana TKDD secara umum sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Namun belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang terbilang masih tinggi.

Tingginya angka investasi di Sulteng tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Sulteng sebagai dampak dari kebijakan dana transfer belum mampu memberikan pengaruh atau kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung menegaskan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan padat modal bukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Saran

1. Dana transfer sebaiknya digunakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Dana transfer digunakan untuk belanja yang bersifat produktif dan meningkatkan belanja modal. Digunakan untuk program-program penanggulangan atau penurunan angka kemiskinan serta belanja untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing dan dapat memenuhi kebutuhan pada lapangan kerja.
3. Lokasi investasi yang masih berfokus pada daerah-daerah pusat bahan baku mengakibatkan adanya ketimpangan atau gap yang tinggi antar daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan lokasi investasi, agar investasi yang masuk tidak hanya berada pada wilayah-wilayah pusat bahan baku. Investor perlu digiring untuk menanamkan modalnya di wilayah lain yang bukan menjadi pusat bahan baku, agar terjadi pemerataan dan memperkecil ketimpangan antar daerah di wilayah Sulteng.
4. Pengembangan dan peningkatan Infrastruktur pendukung khususnya di k Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu perlu segera dibangun agar banyak investor yang masuk dan calon investor yang belum masuk dapat nyaman beroperasi dan membuka lapangan pekerjaan. Tentunya dengan diringi peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
5. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam dunia industri dan peningkatan *'manufacture entrepreneurship'* di

kalangan pengusaha yang ada di Sulteng.

6. Kemampuan keuangan daerah masih sangat minim dalam pengelolaan sebuah kawasan industri seluas 1500 Ha. Terlebih infrastruktur pendukung industri belum secara keseluruhan memadai, seperti: Jalan darat dari dan ke kawasan industri. Kualitas jalan (aksesnya) masih sulit dilalui oleh kendaraan yang berkapasitas besar. Masih sangat terbatasnya ketersediaan/pasokan listrik. Terbatasnya sumber air yang ada, seperti sungai yang berada di dalam kawasan bersifat intermiten (ada jika musim hujan dan kering jika musim kemarau).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan literatur guna pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Keterbatasan

Penelitian kedepannya dapat memasukan variabel dana desa, belanja modal, dan variabel tenaga kerja.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014. Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2022. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. 2005. Dana Perimbangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. www.djpk.kemenkeu.go.id.

Badan Pusat Statistika. 2022. Kemiskinan dan Ketimpangan. www.bps.go.id.

Alyssia, A. 2021. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata, Tingkat Hunian Kamar Melalui Variabel Intervening PDRB Terhadap Kemiskinan. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Asdar. 2012. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode 2001 – 2010). Skripsi.

EvIEWS. (2017). EvIEWS 10 User's Guide II. IHS Global Inc.

Fosu, Augustin Kwasi. 2010. Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. CSAE Working Paper WPS, 07.

Gujarati, Damodar. (2006). Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga

Gumelar, A. Kahirina, N. 2021. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019). Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 3, 529–546. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Nurhidayah. Hendikawati. 2018. Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. Jurnal. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Panji, B. Indrajaya, B. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal. Denpasar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Zulfa, E., Said M., & Muhammad N. (2014). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiahkuala.

https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju

<https://setkab.go.id/menkeu-anggaran-tkdd-dukung-pemulihan-daerah/#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20TKDD%20dapat%20mendukung,Desa%20untuk%20program%20prioritas%20desa>